

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Yuliati¹ Fajar Apriani², Hj. Hariati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh efektivitas program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Definisi operasional meliputi indikator dari variabel efektivitas program yaitu tujuan kebijakan (program); perumusan masalah yang dibuat; tuntutan kebijakan (program); dampak kebijakan (program); dan memadainya sarana atau alat kebijakan (program). Sedangkan untuk indikator variabel kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan dan gizi; pendidikan; perumahan dan lingkungan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota simpan pinjam kelompok perempuan Desa Bukit Raya berjumlah 68 orang dengan jumlah 13 kelompok. Untuk penarikan sampel peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling, dan mengkasifikasikan setiap kelompok dengan cara Proportional Sampling. Sampel diambil sebanyak 58 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research). Alat pengukur data yang digunakan adalah skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi Pearson Product Moment dan Regresi Linier Sederhana. Kesimpulan berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dihasilkan yaitu hubungan antara variabel efektivitas program SPP dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien Korelasi Pearson Product Moment sebesar 0,494 pada tingkat 0,05. Kemudian dari hasil analisis regresi linier sederhana memperoleh hasil persamaan dan hasil uji signifikansi t (t-Test) sebesar 4,250. Kemudian hasil uji koefisien determinasi besar pengaruh antara efektivitas program SPP terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 24,4%.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Kata Kunci : Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan utama dalam pembangunan yaitu menyejahterakan masyarakat. Suatu kelompok atau individu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila sebagian besar terpenuhinya kebutuhan dasar, biaya pendidikan serta kesehatan yang murah dan berkualitas. Namun, seringkali terjadi kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dengan kemampuannya. Besarnya tuntutan hidup yang dihadapi terkadang tidak sesuai dengan kemampuannya sendiri, mengakibatkan masyarakat tidak berdaya yang akhirnya menjadi penyebab utama kemiskinan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34 Ayat 1 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Maksud dari Pasal 34 Ayat 1 yaitu semua warga negara Indonesia termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dibantu oleh negara, maka secara tidak langsung sudah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin. Pemerintah wajib membuat suatu program yang dapat membantu warganya untuk bisa terus hidup dan memiliki usaha serta penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, mulai tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan payung kebijakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri telah resmi berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Khususnya PNPM Mandiri Perdesaan (MPd) sekarang telah berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). DAPM merupakan perubahan dari pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri sehubungan telah berakhirnya PNPM Mandiri. DAPM diperlukan untuk menghindari kerancuan dan atau persamaan dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta melindungi aset dana bergulir serta menghindari potensi konflik di masyarakat akibat ketidakjelasan status aset tersebut. Salah satu program DAPM di pengembangan ekonomi adalah Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP) difokuskan kepada para masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) terutama kaum perempuan yang ingin meminjam modal dengan suku bunga yang lebih rendah dari pada bank.

Program SPP bukan satu-satunya program penanggulangan kemiskinan, tetapi melalui program ini pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan khususnya wilayah perdesaan. Program SPP secara menyeluruh di Indonesia, salah satunya di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang. Jumlah RTM berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat dilihat dari jumlah KK prasejahtera dan sejahtera I. tingkat kesejahteraan di Desa Bukit Raya tahun 2016 sebesar 630 KK dari 1.653 KK atau 38,11%, sedangkan tahun 2017 sebesar 623 KK dari 1.649 KK atau 37,69% dari total rumah tangga seluruhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bukit Raya masih membutuhkan kebijakan dari pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Sebagian besar masyarakat Desa Bukit Raya merasa tidak percaya diri akan potensinya dalam menciptakan sebuah peluang usaha. Seringkali permasalahan ini dialami oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga 1.204 jiwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau setengah pengangguran, mayoritas penduduk Desa Bukit Raya menggantungkan tingkat ekonominya terhadap pertanian atau perkebunan 118 jiwa. Penyebab ketidakberdayaan masyarakat dikarenakan sumber daya manusia cenderung rendah mayoritas hanya tamat SD/Sederajat sehingga kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Disamping itu, tingkat kemiskinan menjadi salah satu penyebab terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan usahanya karena kurangnya sumber daya modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab kreatifitas dalam pengembangan usaha menjadi terbatas. Padahal modal dianggap unsur yang paling penting dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada pengaruh efektivitas program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?”

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plato dalam Pasolong (2014:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Berbeda menurut Dye dalam Pasolong (2014:39) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.

Efektivitas Program

Secara umum efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Mahmudi (2005:92) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Abidin (2012:25-32) menyatakan bahwa melalui proses kebijakan, terhadap tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur. Maka suatu program sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dapat dikatakan efektif atau tidaknya, tergantung kepada kelima unsur kebijakan tersebut., diantaranya:

1. Tujuan Kebijakan, kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional dan realistis, jelas, dan berorientasi kedepan
2. Masalah Kebijakan, masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.
3. Tuntutan Kebijakan, tuntutan muncul karena dari salah satu dari dua sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka akibat mereka tidak mempunyai akses dalam proses perumusan kebijakan atau karena kalah dalam persaingan antar berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mereka cukup banyak dalam masyarakat. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Tuntutan semacam ini bukan suatu hal yang negatif, tetapi merupakan buah dari keberhasilan.
4. Dampak Kebijakan, dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan, yang untuk setiap jenis kebijakan dampaknya sulit diperhitungkan akibatnya tidak tersedianya informasi yang cukup, dan proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dalam bidang sosial sulit diamati karena berbeda untuk tiap masyarakat dan tiap sektor.
5. Sarana atau Alat Kebijakan, suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan transformasi pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri sehubungan dengan telah berakhirnya PNPM MPd yang harus dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka percepatan Penanggulangan kemiskinan. Nama DAPM digunakan sebagai pengganti “dana bergulir masyarakat” (SPP, UEP dan lain-lain) guna menegaskan bahwa dana ini milik masyarakat berasal dari bantuan sosial bukan bantuan modal. Sedangkan peran pemerintah adalah menjalankan fungsi pembinaan agar dana bagi warga masyarakat miskin tersalurkan dengan tepat (Kementerian PPN/Bappenas, DAPM).

Aset UEP dan SPP yang dikelola oleh UPK adalah dana BLM atau Bansos yang bersifat hibah, agar tidak terjadi perpindahan kepemilikan dari penerima dana BLM atau Bansos dan melestarikannya kelembagaan maupun sistem yang telah terbangun dapat berjalan dengan baik, untuk dapat menerima bantuan hibah tersebut dari pemerintah perlu badan hukum dengan bentuk “Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH)” disahkan oleh Kemenkumham (Purnomo, 2016:4).

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan salah satu PNPM MPd/DAPM di pengembangan ekonomi. SPP merupakan salah satu kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha (PTO Penjelasan IV Jenis dan proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM MPd, 2014:67).

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Rambe dalam Sinarti (2006:13) kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur taraf kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan garis kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin. Menurut BPS (2017:151), yaitu:

1. *Kependudukan/Population*, merupakan data dan informasi strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia.
2. *Kesehatan dan Gizi/Health and Nutrition*, merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan dan gizi meliputi derajat kesehatan masyarakat tingkat imunisasi dan gizi balita, ketersediaan fasilitas serta status kesehatan ibu dan balita.
3. *Pendidikan/Education*, merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar.
4. *Ketenagakerjaan/Employment*, meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan atau usaha dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak.
5. *Taraf dan Pola Konsumsi/Consumption and Pattern*, dapat diukur dari distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).
6. *Perumahan dan Lingkungan/Housing and Environment*, meliputi kualitas tempat tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan.

7. Sosial Budaya/*Other Social Concerns*, perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dicerminkan melalui beberapa indikator seperti akses pada informasi dan hiburan serta kegiatan sosial budaya.

Pengaruh Efektivitas program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam setiap kegiatan atau program, efektivitas merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wardani (2012) dengan judul Efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Korelasi pada PNPM Mandiri Perkotaan di BKM “Amanah Sejahtera” Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipura Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui pendapatan riil keluarga, pemenuhan kebutuhan pendidikan keluarga, pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Hasil penelitian Purnamasari (2015) dengan judul Pengaruh Program Pemerintahan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menyatakan PNPM Mandiri mempunyai hubungan kuat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Nilai kontribusi PNPM Mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sebesar 42,25% dan sisanya 57,75% ditentukan oleh variabel lain.

Hipotesis

1. Hipotesis Nol atau Nihil (H_0), tidak ada pengaruh antara efektivitas Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hipotesis Alternatif atau Kerja (H_a), ada pengaruh antara efektivitas Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Definisi Konseptual

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan, maka definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas program adalah keberhasilan dalam pencapaian tujuan program yang telah ditentukan yang menggunakan tolak ukur dari membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kehidupan atau keadaan yang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yang mengacu mengacu pada semua variabel dan indikator-indikator variabel yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X) adalah efektivitas Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dengan menggunakan indikator menurut Abidin (2012:25-32), yaitu:
 - a. Ketercapaian tujuan kebijakan (program).
 - b. Ketercapaian atas perumusan masalah yang dibuat.
 - c. Ketercapaian atas pemenuhan tuntutan kebijakan (program).
 - d. Ketercapaian atas dampak kebijakan (program) yang muncul setelah implementasi kebijakan (program).
 - e. Ketercapaian atas memadainya sarana atau alat kebijakan (program).
2. Variabel terikat (Y) adalah Kesejahteraan Masyarakat, dengan menggunakan indikator menurut BPS (2017:151), yaitu:
 - a. Kesehatan dan Gizi.
 - b. Pendidikan.
 - c. Perumahan dan Lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:55).

Populasi dalam penelitian ini yaitu kelompok SPP Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 13 kelompok dengan 68 orang jumlah peminjam dana. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik slovin dengan taraf kesalahan 5%., maka sampel yang diambil yaitu 58 responden. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik pengambilan sampling *Simple Random Sampling*, dan mengkasifikasikan setiap kelompok dengan menggunakan *Proportional Sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), meliputi observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert* dengan kriteria atau skor jawaban responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam nilai skala atau jenjang 5 (1,2,3,4,5). Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi yang sangat positif sampai sangat negatif.

Mengenai kriteria atau skor jawaban responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam nilai skala atau jenjang 5 (1,2,3,4,5) dengan masing-masing diberikan nilai sebagai berikut:

- a. Jika responden menjawab sangat setuju, maka diberi nilai 5.
- b. Jika responden menjawab setuju, maka diberi nilai 4.
- c. Jika responden menjawab cukup, maka diberi nilai 3.
- d. Jika responden menjawab tidak setuju, maka diberi nilai 2.
- e. Jika responden menjawab sangat tidak setuju, maka diberi nilai 1.

Data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner akan diolah berdasarkan dua teknik analisis data, yaitu:

a. Analisis Univariat

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu distribusi frekuensi, dengan rumus:

$$P = \frac{F}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Persentase (%)
- F : Frekuensi
- N : Jumlah Responden
- 100%: Angka Tetap

b. Analisis Bivariat

Analisis *bivariat* adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolaborasi. Peneliti menggunakan pengujian koefisien korelasi *Product Moment*, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2012:212)

Keterangan :

- r_{xy} : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
- XY : Jumlah nilai variabel XY
- X : Jumlah nilai variabe X
- Y : Jumlah nilai variabel Y
- n : Jumlah responden atau sampel

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil koefisien korelasi *Product Moment* yang telah diperoleh, maka perlu dikonsultasikan secara langsung dengan melihat tabel korelasi product moment dengan ketentuan jika r_{xy} hitung < r_{xy} tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Tetapi sebaliknya, jika r_{xy} hitung > r_{xy} tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Selanjutnya untuk menguji apakah nilai koefisien kolerasi *Product Moment* yang telah diperoleh dapat digeneralisasikan untuk populasi, maka perlu dilakukan uji signifikans menggunakan Uji T (*t-Test*) dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2012:214)

Keterangan:

- t : Uji Signifikansi
- r : Koefisien Korelasi
- n : Jumlah Sampel.

Setelah mengetahui signifikansi koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian melalui perhitungan koefisien determinasi, dengan rumus:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

- Kd : Koefisien Determinasi
- r : Koefisien Korelasi

Selanjutnya analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Analisis yang digunakan adalah *Regresi Linier Sederhana* dengan rumus:

$$\hat{Y} = a + bX$$

(Sugiyono, 2012:238)

Keterangan:

- \hat{Y} : Nilai yang diprediksikan
- a : Nilai Konstanta atau bila harga x sama dengan 0
- b : Koefisien regresi
- X : Nilai variabel *independent*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara variabel efektivitas program SPP dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien Korelasi pearson product moment sebesar 0,494. Dengan nilai r_{xy} hitung (0,494) > r_{xy} tabel (0,266) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat diketahui bahwa variabel efektivitas program SPP (X) dengan variabel kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki hubungan dengan tingkat sedang. Selanjutnya pengaruh efektivitas program SPP terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan hasil uji signifikansi t (*t-Test*) sebesar 5,016. Dengan nilai t_{hitung} (4,250) > t_{tabel} (1,673), maka H_a diterima H_0 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa korelasi antara efektivitas program SPP terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang positif dan signifikan.

Kemudian melalui perhitungan koefisien determinasi yang besarnya merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r^2) dengan nilai koefisien determinasi sebesar 24,4. Maka dapat diketahui bahwa variabel efektivitas program SPP (X) berpengaruh sebesar 24,4% terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dan sisanya sebesar 75,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya pengaruh efektivitas program terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana, dimana diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu $\hat{Y} = 43,117 + 0,237X$.

Berdasarkan hasil penelitian melalui persentase jawaban responden, peneliti dapat mengetahui bahwa dalam efektivitas program terdapat indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur. Dimana dalam penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program yang terdiri dari tujuan kebijakan (program), perumusan masalah yang dibuat, tuntutan kebijakan (program), dampak kebijakan (program), dan memadainya sarana atau alat kebijakan (program). Dari kelima indikator tersebut dapat diketahui bahwa indikator dengan skor tertinggi yaitu perumusan masalah yang dibuat, sedangkan indikator skor terendah yaitu dampak kebijakan (program). Kesejahteraan masyarakat terdapat indikator-indikator yang menjadi tolak ukur yang terdiri dari kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, serta sosial dan budaya. Dari kelima indikator tersebut dapat diketahui bahwa indikator merupakan indikator dengan skor tertinggi yaitu perumahan dan lingkungan, sedangkan untuk skor terendah yaitu indikator pendidikan.

Demikian hasil penelitian, bahwa antara efektivitas program SPP dengan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas program SPP sebagai salah satu faktor pengukur yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apabila program yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif, maka kualitas suatu program yang diberikan akan semakin baik, efektif, dan dapat mempengaruhi hasil yaitu kepuasan yang diterima setelah merasakan program tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh efektivitas program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup antara efektivitas program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dengan kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya sebesar 49,4%. Namun, pengaruh efektivitas program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya lemah atau sebesar 24,4%.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi UPK DAPM dalam meningkatkan atau mengevaluasi program SPP agar lebih efektif sebagai berikut:

1. Unit pengelola kegiatan sebaiknya menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan sebaiknya bekerjasama dengan pihak ketiga atau instansi terkait dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, wawasan mengenai cara mengelola keuangan usaha serta membangun jiwa kewirausahaan, memberikan motivasi kepada masyarakat.
2. Unit pengelola kegiatan sebaiknya memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan ide-ide atau saran-saran ketika mendapatkan permasalahan dalam usahanya. Perlu adanya pengarahan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan pemberian dana bergulir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program SPP sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dari pengguna dana bergulir yang tidak sesuai dengan tujuan program SPP.
3. Unit pengelola kegiatan dan tim verifikasi sebaiknya lebih teliti menerima masyarakat terutama dengan latar belakang tingkat ekonominya, setiap mengajukan pinjaman baik kelompok lama maupun kelompok baru. Dan meningkatkan pengawasan, meninjau perkembangan usaha para peminjam dana bergulir secara berkala.
4. Unit pengelola kegiatan sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi kelompok maupun anggota kelompok yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dan menunggak sampai bertahun-tahun lamanya.
5. Unit pengelola kegiatan harus memantau berjalannya pinjaman mulai dari awal verifikasi sampai dengan tutup buku, sehingga dapat diketahui bahwa kelompok peminjam tersebut benar-benar memanfaatkan dana bergulir sebaik-baiknya untuk kepentingan produktif bukan untuk konsumtif.
6. Penelitian ini tidak mengukur pendapatan pada variabel kesejahteraan masyarakat. Maka bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan permasalahan yang sama menggunakan indikator pendapatan pada variabel kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adimihardja, Kusnaka. 2011. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastomo. 2008. *Sistem jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera Pengembangan, Evaluasi dan Bekelanjutannya*. Falkutas Ekologi Manusia Institut Bagor.

Dokumen:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Profil Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016.
- Profil Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017.
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Paket Informasi 2012-2013.
- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan.
- Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Penganggulangan Kemiskinan.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017 *Welfare Indicators 2017*. Badan Pusat Statistik.
- Perlindungan dan Penataan Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan. Koordinator Bidang Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Skripsi:

- Purnamasari, Nur Inas. 2015. Skripsi: *Pengaruh Program Pemerintahan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Program Studi Ilmu Pemerintahan. Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Sember Internet:

Purnomo, Dwi. Tinjauan Yuridis Pelestarian Aset UEP-SPP Hasil PPK dan/atau PNPM MPd 2016. (www.[docplayer.info](http://www.docplayer.info), di akses tanggal 26 Oktober 2017).

Wardani, Ririn Kusuma. 2008. Skripsi:*Efektivitas Program Pinjaman Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Korelasi Pada PNPM Mandiri Perkotaan Di BKM "Amanah Sejahtera" Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*. Surakarta:Falkutas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. (www.eprints.ums.ac.id, di akses tanggal 4 September 2018).